TEROPONG

Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agust | Sept | Okt | Nov | Des

2015

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

LSM pakar Minta Gubernur DKI

JAKARTA, TEROPONG - TERKAIT adanya dugaan mark-up dalam proyek Pengadaan Alat-alat Kesehatan (Alkes) senilai Rp.1,2 miliar tahun anggaran 2012 di Suku Dinas (Sudin) Kesehatan Jakarta Selatan, Ketua LSM PAKAR Jimmy S minta Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) agar mencopot Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta dari jabatannya. Pasalnya, Kadis tersebut diduga tidak tegas selaku pimpinan terhadap bawahannya yang diduga terlibat tindak pidana korupsi (mark-up), karena hingga saat ini kedua tersangka masih bekerja seperti biasa tanpa ada tindakan sanksi/teguran dari Kadis tersebut dan terkesan melindungi bawahannya. Padahal, mantan Kasudin Kesehatan Jakarta Selatan dan Kepala Puskesmas Setiabudi ini, Kejaksaan Agung RI telah menyatakan sebagai tersangka sesuai Surat Perintah Penyelidik Direktur Penyelidikan Jaksa Agung Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung RI dengan nomor Print-111/F.2/Fd.1/10/2013 tanggal 30 Oktober 2013 atas nama tersangka Dr.Kurnianto Amin,MM (mantan Kasudin Kesehatan Jakarta Selatan) dan nomor Print-112/F.2/Fd.1/10/2013 tanggal 30 Oktober 2013 atas nama tersangka Dr.Dyah Eko Judihartanti (mantan Kepala Puskesmas Setiabudi).

Lebih jauh, ia mengatakan, hasil investigasi kami di lapangan bahwa kedua tersangka hingga saat ini masih bekerja, kami menduga penanganan kasus tersebut tidak berjalan sesuai mekanisme atau berjalan ditempat. Dan menurut informasi yang dihimpun di lapangan, tersangka diduga telah memberikan suap kepada oknum Penyelidik dan oknum LSM, sehingga kasus dugaan mark-up tenggelam bagai ditelan Laut.

"Untuk itu, kami harapkan kepada Kejaksaan Agung serta pihak Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan (Jamwas) untuk segera berkordinasi dengan pihak Penyidik dari Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung, agar kasus tersebut segera ditindaklanjuti hingga ke meja hijau, agar ketahuan siapa-siapa yang terlibat didalamnya, sehingga terciptanya Negara yang bebas dan bersih dari korupsi sesuai komitmen bersama Inpres No.5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan korupsi", lanjutnya.

Ia menambahkan, jika pihak Kejaksaan Agung Muda Tindak Pidana Khusus mau menyelesaikan kasus ini sudah gampang, karena saksi-saksi sudah ada.

"Kami mohon kepada Gubernur agar meninjau kembali SK Pengangkatan kedua pejabat tersebut dan kami harapkan jangan menempatkan orangnya yang diduga terlibat tindak pidana korupsi", tuturnya.

Ketika hal ini ingin dikonfirmasikan kepada Dr. Kurnianto Amin,MM dan Dr.Dyah Eko Judihartanti di kantor Dinas Kesehatan Tanah Abang, Jakarta Pusat tidak ada ditempat dan mencoba beberapa kali menghubungi telepon selulernya juga tidak berhasil.